



DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KOTA BATAM

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2026

PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS CIPTA KARYA
DAN TATA RUANG
KOTA BATAM

DINAS CIPTA KARYA
DAN TATA RUANG
KOTA BATAM



AIR BERSIH DAN
AIR LIMBAH DOMESTIK



PRASARANA
BANGUNAN GEDUNG



RENCANA
TATA RUANG



BINA
KONSTRUKSI



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 372 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Batam tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan...

16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4);
18. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1722);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN
- c. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;

b. landasan...

- b. landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memastikan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 26 Agustus 2026

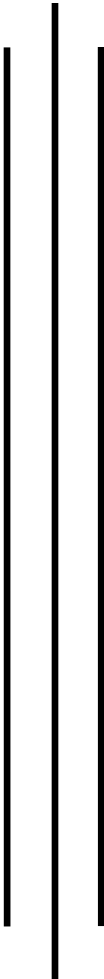
WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHMAD

LAMPIRAN XIII : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 372 TAHUN 2026
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Perubahan Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2026 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2026 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025 s.d 2029.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2026, semoga Perubahan Renja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Batam, 21 Agustus 2026
Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Kota Batam



Azril Apriansyah, ST, M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19730408 200212 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISIii

DAFTAR TABEL/GAMBAR.....iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2. Landasan Hukum.....2

1.3. Maksud dan Tujuan4

1.4. Sistematika Penulisan5

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2026.....6

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I Tahun 20266

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 11

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 12

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 14

3.1. PERUBAHAN BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 14

3.2. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 14

BAB IV PENUTUP39

4.1. Catatan Penting.....39

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan39

4.3. Rencana Tindak Lanjut39

DAFTAR TABEL/GAMBAR

Tabel 2.1.	:	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 s.d Triwulan II Tahun 2026
Tabel 2.2.	:	Pencapaian Kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2026 s.d Triwulan II
Tabel 3.1	:	Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau ;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan; dan
- c. Penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan;
- c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. Penutup.

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2026 maka Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2026, setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
 13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435)
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

22. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
23. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana .Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119).
26. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau : 6,39/2023;
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tanggal 20 agustus 2025 tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);
28. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan belanja Daerah Kota Batam Tahun 2026
29. Peraturan Walikota Batam Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Nongsa, Batam Kota, Bengkong, Batu Ampar, Lubuk Baja, Sekupang, Dan Batu Aji Kota Batam Tahun 2021-2041 2041 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 847);
30. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 249 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Sungai Beduk Kota Batam Tahun 2022-2042;
31. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 250 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Belakang Padang Kota Batam Tahun 2022-2042;
32. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 251 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Sagulung Kota Batam Tahun 2022-2042;
33. Peraturan Walikota Batam Nomor 27 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam
34. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2025, tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam tahun 2026 (Berita Daerah 1614);
35. Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2025, Tentang Recana Strategis Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya Tata Ruang Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1649);
36. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2026, Tentang Perubahan RKPD Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2026 Nomor 1721);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam adalah menyediakan dokumen yang

berisi rencana kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam untuk periode 1 (satu) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam antara lain:

- a. Sebagai koridor pelaksanaan program kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Perubahan tahun 2026;
- b. Sebagai bahan acuan penyusunan Perubahan RKA SKPD Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam tahun 2026, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang penulisan (1.1), dasar hukum (1.2), maksud dan tujuan (1.3), dan sistematika penulisan (1.4).

BAB II EVALUASI RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

Menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu (2.1), hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD sampai dengan triwulan II tahun 2026 (2.2), analisis kinerja pelayanan OPD (2.3), isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Memuat rencana kerja dan pendanaan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2026.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan kesimpulan-kesimpulan (4.1), Catatan penting dalam penyusunan renja (4.2), Kaidah –kaidah pelaksanaan (4.3), rencana tindak lanjut

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 100 % diakhir tahun, terrealisasi di triwulan II sebesar 50 % atau capaian realisasi sebesar 50 %
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target 100 % diakhir tahun, terrealisasi di triwulan II sebesar 51.57 % atau capaian realisasi sebesar 51.57 %
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target 100 % diakhir tahun, terrealisasi di triwulan II sebesar 0 % atau capaian realisasi sebesar 0 %
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 100 % diakhir tahun, terrealisasi di triwulan II sebesar 67.06 % atau capaian realisasi sebesar 67.06 %
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100 % diakhir tahun, terrealisasi di triwulan II sebesar 93.17 % atau capaian realisasi sebesar 93.17 %
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 100 % diakhir tahun, terrealisasi di triwulan II sebesar 49.95 % atau capaian realisasi sebesar 49.95 %
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 100 % diakhir tahun, terrealisasi di triwulan II sebesar 49.21 % atau capaian realisasi sebesar 49.21 %
- b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Minum
 - Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dengan target 1.000 jiwa diakhir tahun, terrealisasi di triwulan II sebesar 532 jiwa atau capaian realisasi sebesar 38 %
- c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan target 800 jiwa diakhir tahun, terrealisasi di triwulan II sebesar 160 jiwa atau capaian realisasi sebesar 20 %

- d. Program Program Penataan Bangunan Gedung
 - Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dengan target 440 unit diakhir tahun, terrealisasi di triwulan II sebesar 352 unit atau capaian realisasi sebesar 80 %
 - e. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan target 1 dokumen jiwa diakhir tahun, terrealisasi di triwulan II sebesar 0 dokumen atau capaian realisasi sebesar 0 %
 - Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan target 5 dokumen diakhir tahun, terrealisasi di triwulan II sebesar 0 dokumen atau capaian realisasi sebesar 0 %
- 2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 100 % diakhir tahun, terrealisasi di triwulan II sebesar 67.06 % atau capaian realisasi sebesar 67.06 %
- 2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target dengan target 100 % diakhir tahun, terrealisasi di triwulan II sebesar 93.17 % atau capaian realisasi sebesar 93.17 %
Melebihi target dikarenakan pengadaan di percepat dari bulan Juli ke bulan Mei 2026
 - Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan target 54.57 % diakhir tahun, terrealisasi di triwulan II sebesar 55.44 % atau capaian realisasi sebesar 101.59 %
Kondisi tersebut dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan yang lebih cepat dari jadwal yang direncanakan, optimalisasi koordinasi antar unit kerja, serta dukungan sumber daya dan pagu yang tersedia. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan memberikan hasil yang lebih baik dari target Semester I yang telah ditetapkan
 - b. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi dengan target 33.33 % diakhir tahun, terrealisasi di triwulan II sebesar 33.21 % atau capaian realisasi sebesar 99.64 %
 - c. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota dengan target 403 dokumen diakhir tahun, terrealisasi di triwulan II sebesar 280 dokumen atau capaian realisasi sebesar 32.50 %

Tabel 2.1
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 S.D. TRIWULAN II
TAHUN 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja Tahun 2026)	Realisasi Capaian/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	90.84 Poin	90.82 Poin	
		Nilai SAKIP PD	74.33 Angka	70.9 Angka	
1.03.01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100%	50 %	50%
1.03.01.2. 01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1 Dokume n	50%
1.03.01.2. 01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	6 Dokume n	50%
1.03.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	51.57	51.57 %
1.03.01.2. 02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	165 Orang/bulan	165 Orang/b ulan	100 %
1.03.01.2. 02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	6 Dokume n	50%
1.03.01.2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 %	0	0
1.03.01.2. 05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	0	0
1.03.01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan umum perkantoran	100 %	67.06%	67.06%
1.03.01.2. 06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	0
1.03.01.2. 06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	3 Paket	75 %
1.03.01.2. 06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0.5 Paket	50 %
1.03.01.2. 06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	0 %
1.03.01.2. 06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	6 Dokume n	50%
1.03.01.2. 06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	6 laporan	50%
1.03.01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Mlik Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan	100 %	93.17 %	93.17 %
1.03.01.2. 07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	48 unit	45 unit	93.75%
1.03.01.2. 07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 unit	11 unit	40.74%
1.03.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang Sesuai Perencanaan	100 %	49.95 %	49.95 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja Tahun 2026)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1.03.01.2. 08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	6 laporan	50.00%
1.03.01.2. 08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	6 laporan	50.00%
1.03.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Dipelihara dan Berfungsi Dengan Baik	100	49.21 %	49.21 %
1.03.01.2. 09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%
1.03.01.2. 09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	13 Unit	65.00%
1.03.01.2. 09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64 Unit	4 Unit	6.25%
1.03.01.2. 09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%
1.03.01.2. 10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Rumah Tangga Yang di Layani UPT. Pengelolaan Air Bersih Sesuai Ketentuan	54.57 %	55,44%	101.59 %
1.03.01.2. 10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100%
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang terlayani air bersih	54.57%	55.44 %	101.59 %
1.03.03.2. 01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk berakses air minum yang disupply Pemerintah Kota Batam	1.400	532 jiwa	38 %
1.03.03.2. 01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2 Dokumen	0 Dokume n	0
1.03.03.2. 01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	5 Liter/Detik	2.86 Liter/De tik	57.20%
1.03.03.2. 01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	2.5 Liter/Detik	1.86 Liter/De tik	74.40%
1.03.03.2. 01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	35 Unit	31 Unit	88.57%
1.03.03.2. 01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	273 SR	133 SR	48.72%
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang terlayani air limbah domestik	58.96%	59.88%	101.56 %
1.03.05.2. 01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik/ MCK	800 jiwa	160 jiwa	20%
1.03.05.2. 01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik (SPSLD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	4.24 M3/Hari	1.75 M3/Hari	41.27%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja Tahun 2026)	Realisasi Capaian Program/Sub Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1.03.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung Sesuai Standar	33.33%	32.42%	97.27%
1.03.08.2. 01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah unit bangunan daerah yang ditangani (dibangun, dipelihara, direhabilitasi/ revitalisasi dan diawasi)	440 Unit	352 Unit	80.00%
1.03.08.2. 01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	14 Unit	0 Unit	0,00%
1.03.08.2. 01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	4 Bangunan Gedung	0 Unit	0,00%
1.03.08.2. 01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	0 Dokume n	0,00%
1.03.08.2. 01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	416 Dokumen	352 dokume n	84.62%
1.03.11.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase peningkatan Tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi	33.33%	33.21%	99.64%
		Persentase penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	27.27%	14.36%	52.66%
1.03.11.2. 01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi Yang Disertifikasi dan Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina	400 Orang	618 orang	154.50 %
1.03.11.2. 01.0006	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	300 Orang	568 orang	189.33 %
1.03.11.2. 01.0007	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	19 Lembaga	19 lembaga	100%
1.03.11.2. 04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	100 Laporan	29	29 %
1.03.11.2. 04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	100 Paket Pekerjaan	29 Paket Pekerjaa n	29 %
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pembangunan terhadap rencana tata ruang	32.05%	35.67 %	78.47%
1.03.12.2. 01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kota Batam yang Ditetapkan	403 Dokumen	280 Dokume n	32.50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja Tahun 2026)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
	Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota				
1.03.12.2. 01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/ Kota	401 Dokumen	280 Dokume n	32.66 %
1.03.12.2. 01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0 Dokume n	0 %
1.03.12.2. 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi publik	50 Orang	0	0
1.03.12.2. 02.0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Kegiatan	-	-
1.03.12.2. 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan dokumen hasil monev wilayah perencanaan	2 Dokumen	0 Dokume n	0
1.03.12.2. 03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen	0	0
1.03.12.2. 03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	0	0
1.03.12.2. 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	5 Dokumen	0	0
1.03.12.2. 04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	0 Dokumen	-	-
1.03.12.2. 04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	5 Dokumen	0	0
1.03.12.2. 04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah Berita Acara Pemberian Insentif dan/atau disinsentif non fiskal	1 Berita Acara	-	-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2026 s/d Triwulan II

No	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026		Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 TW II		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	Poin	90.84	Poin	90.82	
	Nilai SAKIP PD	Angka	74.33	Angka	70.90	
2	Persentase penduduk yang terlayani air bersih	Persentase	54.57	Persentase	55.44	
3	Persentase penduduk yang terlayani air limbah domestik	Persentase	58.96	Persentase	59.88	
4	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan Gedung sesuai standar	Persentase	33.33	Persentase	32.42	

No	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026		Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 TW II		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
5	Persentase peningkatan tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi	Persentase	33.33	Persentase	47.21	
	Persentase penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase	27.27	Persentase	14.36	
6	Persentase kesesuaian Pembangunan terhadap rancana tata ruang	Persentase	32.05	Persentase	35.67	

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kinerja yang tercapai di triwulan II ini hanya terbatas pada kinerja yang didukung melalui pelaksanaan kegiatan yang bersifat rutin, Pemenuhan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkotaan dari pengawasan bangunan dan menara serta Pemenuhan Fasilitas Layanan Keuangan dan Administrasi Penunjang Dinas.

Ketidaktercapaian target kinerja di triwulan pertama merupakan kondisi normal, terutama pada instansi teknis mengingat proses pelaksanaan kegiatan, terutama fisik, yang membutuhkan waktu yang panjang dalam proses persiapan dan penyelenggaraan kegiatannya. Triwulan pertama digunakan sepenuhnya untuk persiapan kegiatan, termasuk proses penetapan P3DN sebagai langkah awal dalam pemilihan barang dan vendor pada proses pengadaan. Selain persyaratan administrasi yang berimbas pada waktu penyelesaian proses pengadaan, tidak ada kendala lain yang secara signifikan mempengaruhi proses pengadaan.

Namun demikian, sebagai salah satu OPD yang berfokus terhadap pemenuhan infrastruktur fisik, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan dukungan anggaran dari Pemerintah Kota Batam, optimis akan dapat mencapai kinerja secara optimal di akhir tahun anggaran.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagaimana telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025-2029, isu-isu penting/strtegis yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan tugas dan Fungsi adalah meliputi :

1. Meningkatkan/mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana dan sarana bangunan baik bangunan pemerintah maupun fasilitas untuk masyarakat.
2. Meningkatkan koordinasi kelembagaan penyelenggaraan tata ruang antara penyelenggaraan tata ruang nasional, provinsi dan kota serta penyelenggaraan regulasi, kelembagaan, pembagian kewenangan, dan perijinan pemanfaatan ruang.
3. Menyelaraskan pembangunan prasarana air bersih dan air limbah domestik wilayah hinterland.
4. Praktek penyelenggaraan ke Cipta Karya-an ke depan tidak lagi diwarnai oleh sistem yang birokratis, kurang fleksibel, dengan kapasitas inovasi dan kretativitas yang masih terbatas.

5. Kegiatan pengelolaan infrastruktur masih terkonsentrasi pada aspek pembangunan belum memperhatikan aspek pemanfaatan dan pengembangan asset.
6. Kualitas dan kuantitas SDM di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang masih belum memadai, baik dari jumlah maupun kompetensinya. Kondisi ini perlu ditingkatkan melalui pengembangan kapasitas dan pemenuhan kebutuhan SDM sesuai beban kerja agar pelayanan dan kinerja perangkat daerah dapat berjalan optimal.

Keenam isu penting tersebut menjadi fokus penanganan dan menjadi dasar perencanaan dalam penentuan/penetapan program kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, tidak terkecuali pada perencanaan program kegiatan Tahun 2026.

Selain isu teknis sebagaimana dijabarkan diatas, isu lain yang turut mempengaruhi pencapaian kinerja di tahun 2026 ini adalah efisiensi belanja yang didasarkan atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Efisiensi yang dilakukan berakibat terhadap optimalisasi anggaran, dimana keterbatasan anggaran memaksa instansi untuk melaksanakan tupoksinya secara lebih efektif.

Isu-isu inilah yang kemudian menjadi pertimbangan utama dalam pengelolaan anggaran di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam tahun 2026. Jawaban atas isu yang berkembang diwujudkan dalam rencana kerja perubahan dengan harapan dapat memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2026

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Kota Batam pada Tahun 2026 didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026.

Perubahan Rencana Kerja belanja Perangkat Daerah Tahun 2026 berdasarkan kemampuan anggaran Pemerintah Kota Batam yang tersedia. Untuk Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam pada belanja awal Rencana Kerja adalah sebesar Rp. 204.198.126.694,16, sedangkan Perubahan Rencana Kerja adalah sebesar Rp. 193.902.883.591,27 berkurang sebesar Rp. 10.295.243.102,89 pengurangan anggaran pada APBD Perubahan diperlukan untuk menindaklanjuti kebijakan efisiensi anggaran, penyesuaian target pelaksanaan kegiatan, serta pengalihan prioritas anggaran untuk mendukung program yang lebih mendesak sesuai kebijakan Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan. serta prioritas Pembangunan daerah pada tahun berjalan.

3.2. Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan

Program dan Kegiatan serta Sub kegiatan yang mengalami perubahan (penambahan/pengurangan/pergeseran) yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.4.2. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik
 - 1.4.4. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 1.4.5. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.4.6. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5.1. Subkegiatan Pengadaan Mebel

- 1.5.2. Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.2. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.7.2. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.7.3. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.7.4. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 1.8. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
 - 1.8.1. Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
- 2. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - 2.1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1. Subkegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 - 2.1.2. Subkegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
 - 2.1.3. Subkegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
 - 2.1.4. Subkegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 - 2.1.5. Subkegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
- 3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - 3.1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.1. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
- 4. Program Penataan Bangunan Gedung
 - 4.1. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
 - 4.1.1. Subkegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.1.2. Subkegiatan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.1.3. Subkegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.1.4. Subkegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
- 5. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
 - 5.1. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

- 5.1.1. Subkegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
- 5.1.2. Subkegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi
- 5.2. Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
 - 5.2.1. Subkegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
- 6. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 6.1. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
 - 6.1.1. Subkegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
 - 6.1.2. Subkegiatan Penetapan RDTR Kabupaten/Kota
 - 6.2. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - 6.2.1. Subkegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 6.2.2. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
 - 6.3. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - 6.3.1. Subkegiatan Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK

Rincian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2026 tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Table 3.1
Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						204.198.126.694,16	193.902.883.591,27	10.295.243.102,89	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	90.84 poin	90.84 poin	35.608.482.814	31.581.733.159,27	- 4.026.749.654,73	
			Nilai SAKIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Nilai SAKIP PD	74.33 angka	74.33 angka	7.294.000	2.084.000	- 5.210.000	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100%	100%	7.294.000	2.084.000	- 5.210.000	
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	2 Dokumen	3.126.000	833.600	-.2.292.400	
5.1.02.01.01.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.126.000	833.600	-2.292.400	
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	3 Laporan	4.168.000	1.250.400	- 2.917.600	
5.1.02.01.01.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					4.168.000	1.250.400	-2.917.600	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	100 %	25.907.403.408	23.094.977.143	-2.812.426.265	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	165 Orang/bulan	165 Orang/bulan	25.624.803.408	22.864.457.143,00	-2.760.346.265	
	Belanja Gaji Pokok PNS	Belanja Gaji Pokok PNS					2.854.428.782	2.762.299.369	-92.129.413	
	Belanja Gaji Pokok PPPK	Belanja Gaji Pokok PPPK					4.348.263.546	4.251.836.296	-96.427.250	
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					352.652.004	299.442.101	-53.209.903	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					361.064.055	341.147.702	-19.916.353	
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					158.450.750	145.761.050	-12.689.700	
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					146.025.600	126.302.760	-19.722.840	
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					78.593.000	72.519.400	-6.073.600	
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					295.990.038	289.294.900	-6.695.138	
	Belanja Tunjangan Beras PNS	Belanja Tunjangan Beras PNS					170.040.958	158.161.659	-11.879.299	
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Belanja Tunjangan Beras PPPK					299.434.416	286.866.000	-12.568.416	
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					1.109.268.573	894.385.775	-214.882.798	
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					173.651.310	140.664.798	-32.986.512	
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Belanja Pembulatan Gaji PNS					198.494	39.799	-158.695	
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					108.562	140.346	31.784	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					267.191.202	249.458.208	-17.732.994	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					171.610.681	370.049.679	198.438.998	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					10.661961	5.691.180	-4.970.781	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					9.945.450	8.807.421	-1.138.029	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					21.986.017	17.073.613	-4.912.404	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK					26.835.180	26.421.178	-414.002	
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					23.237.758	14.655.787	-8.581.971	
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK					40.631.575	18.188.298	-22.443.277	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					3.537.282.048	3.386.676.727	-150.605.321	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					5.121.520.309	3.744.163.870	-1.377.356.439	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
	-	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					196.560.560	193.204.648	-3.355.912	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					5.849.279.141	2.976.162.849	-2.873.116.292	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK					2.708.837.733	2.085.041.730	-623.796.003	
1.03.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	282.600.000	230.520.000	- 52.080.000	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					282.600.000	230.520.000	- 52.080.000	
1.03.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 %	100 %	269.322.700	33.465.000	- 235.857.700	
1.03.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	0	158.332.700	0	-158.332.700	
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-					158.332.700	0	-158.332.700	
1.03.01.2.0 5.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	3 Orang	110.990.000	33.465.000	-77.525.000	
	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					66.250.000	19.875.000	-46.375.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					44.740.000	13.590.000	-31.150.000	
1.03.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	1.418.325.400	723.397.600	-694.927.800	
1.03.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	16.618.000	6.355.300	-10.262.700	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					16.618.000	6.355.300	-10.262.700	
1.03.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	4 Paket	301.385.000	210.773.500	-90.611.500	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					123.724.400	79.771.500	-43.952.900	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					35.910.000	23.400.000	-12.510.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					88.546.200	60.910.000	-27.636.200	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					53.204.400	46.692.000	-6.512.400	
1.03.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25.000.000	15.000.000	-10.000.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantr-Benda pos	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantr-Benda pos					25.000.000	15.000.000	-10.000.000	
1.03.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.000.000	8.000.000	-4.000.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					12.000.000	8.000.000	-4.000.000	
1.03.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	11.822.400	3.940.800	-7.881.600	
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					11.822.400	3.940.800	-7.881.600	
1.03.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.051.500.000	479.328.000	-572.172.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					1.051.500.000	479.328.000	-572.172.000	
1.03.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	100 %	1.162.092.700	486.671.400	-675.421.300	
1.03.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	468.830.000	0	-468.830.000	
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan						468.830.000	0	-468.830.000	
1.03.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	27 Unit	48 Unit	140.551.100	117.013.200	-23.537.900	
	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor						8.050.400	0	-8.050.400	
	Belanja Modal Mebel	Belanja Modal Mebel					66.357.000	50.869.500	-15.487.500	
	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					66.143.700	66.143.700	0	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1.03.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit	27 Unit	552.711.600	367.658.200	-185.053.400	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					17.907.100	579.100	-17.328.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					5.457.700	5.107.100	-350.600	
	Belanja Modal Alat Pendingin						32.800.000	0	-32.800.000	
	Belanja Modal Personal Computer	Belanja Modal Personal Computer					361.790.000	239.316.500	-122.473.500	
		Belanja Modal Peralatan Mainframe						67.000.000	67.000.000	
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					134.756.800	55.655.500	-79.101.300	
1.03.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	585.055.956	476.995.956	-108.060.000	
1.03.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	543.300.000	435.000.000	-108.060.000	
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					25.000.000	10.000.000	-15.000.000	
	Belanja Tagihan Telepon	Belanja Tagihan Telepon					9.300.000	9.000.000	-300.000	
	Belanja Tagihan Air	Belanja Tagihan Air					143.000.000	138.000.000	-5.000.000	
	Belanja Tagihan Listrik	Belanja Tagihan Listrik					288.000.000	278.000.000	-10.000.000	
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet						78.000.000	0	-78.000.000	
1.03.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	41.755.956	41.995.956	240.000	
	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis					39.000.000	39.000.000	0	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis					2.400.000	2.640.000	240.000	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK					96.756	96.756	0	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
	Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis	Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis								
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis					259.200	259.200	0	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	1.053.915.650	909.595.650	-144.320.000	
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	41.080.000	43.840.000	2.760.000	
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					2.800.000	2.800.000	0	
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					38.280.000	41.040.000	2.760.000	
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	17 Unit	584.683.600	467.003.600	-117.680.000	
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					48.133.600	36.433.600	-11.700.000	
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Perorangan					507.990.000	402.730.000	-105.260.000	
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					17.850.000	27.840.000	9.990.000	
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga						10.710.000	0	-10.710.000	
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64 Unit	75 Unit	78.750.000	50.550.000	-28.200.000	
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin					21.350.000	18.300.000	-3.050.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					25.550.000	10.950.000	-14.600.000	
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					14.600.000	10.950.000	-3.650.000	
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					17.250.000	10.350.000	-6.900.000	
1.03.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	349.402.050	348.202.050	-1.200.000	
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					344.602.050	344.602.050	0	
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					4.800.000	3.600.000	-1.200.000	
1.03.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Rumah Tangga yang di layani UPT. Pengelolaan Air Bersih sesuai ketentuan	Persentase Rumah Tangga yang di layani UPT. Pengelolaan Air Bersih sesuai ketentuan	100 %	54.57%	5.205.073.000	5.856.546.410,27	651.473.410	
1.03.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	5.205.073.000	5.856.546.410,27	651.473.410	
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Belanja Barang dan Jasa BLUD					4.848.127.229	5.489.178.388,27	641.051.159	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					356.945.771	367.368.022	10.422.251	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang terlayani air bersih	Persentase penduduk yang terlayani air bersih	54.57%	54.57%	86.338.101.000	63.367.869.144	-22.970.231.856	
1.03.03.2.0 1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk berakses air minum yang disupply Pemerintah Kota Batam	Jumlah Penduduk berakses air minum yang disupply Pemerintah Kota Batam	1.000 jiwa	1.400 jiwa	86.338.101.000	63.367.869.144	-22.970.231.856	
1.03.03.2.0 1.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2 Dokumen	3 Dokumen	666.000.000	765.900.000	99.900.000	
	DED Penyediaan Sarana Air Bersih/Air Minum Pulau Kasam Kel. Kabil, Kec. Nongsa	DED Penyediaan Sarana Air Bersih/Air Minum Pulau Kasam Kel. Kabil, Kec. Nongsa					333.000.000	333.000.000	0	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
	DED Penyediaan Sarana Air Bersih/Air Minum Teluk Bakau – Teluk Sunti	DED Penyediaan Sarana Air Bersih/Air Minum Teluk Bakau – Teluk Sunti					333.000.000	333.000.000	0	
		Konsultan Perencanaan SPAM Kel. Sijantung Kec. Galang						99.000.000	99.000.000	
1.03.03.2.0 1.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	5 Liter/Detik	5 Liter/Detik	28.802.428.050	21.228.267.150	-7.574.160.900	
	Pemeliharaan Tangki Reservoir Pulau Lengkang (100 m3)	Pemeliharaan Tangki Reservoir Pulau Lengkang (100 m3)					117.660.000	117.660.000	0	
	Pemeliharaan Tangki Reservoir Tanjung Gundap (100 m3)	Pemeliharaan Tangki Reservoir Tanjung Gundap (100 m3)					117.660.000	117.660.000	0	
	Pemeliharaan Tangki Reservoir Pulau Jaloh (200 m3)	Pemeliharaan Tangki Reservoir Pulau Jaloh (200 m3)					145.410.000	145.410.000	0	
	Pemeliharaan Tangki Reservoir Pulau Subang Mas (100 M3)	-					117.660.000	0	-117.660.000	
	Pemeliharaan Tangki Reservoir Rempang Cate (50 M3)	-					117.660.000	0	-117.660.000	
	-	Pembangunan Pagar SWRO Pulau Labu					0	509.002.710	509.002.710	
	Pembangunan Pagar WTP Geranting	-					424.187.610	0	-424.186.610	
	Pembangunan Pagar WTP Pulau Air	Pembangunan Pagar WTP Pulau Air					424.187.610	406.690.680	-17.496.930	
	Pembangunan Pagar WTP Pulau Bertam	-					424.187.610	0	-424.187.610	
	Pembangunan Pagar WTP Pulau Temoyong	Pembangunan Pagar WTP Pulau Temoyong					424.187.610	406.690.680	-17.496.930	
	Pembangunan Pagar WTP Seraya	Pembangunan Pagar WTP Seraya					424.187.610	406.690.680	-17.496.930	
	Optimalisasi/Peningkatan IKK Tiangwangkang	-					5.456.760.000	0	-5.456.760.000	
	Optimalisasi/Peningkatan WTP Pulau Terong	-					1.149.960.000	0	-1.149.960.000	
	Optimalisasi/Peningkatan WTP Pulau Pemping	-					4.728.600.000	0	-4.728.600.000	
	Optimalisasi/Peningkatan WTP Pulau Pecung	-					1.149.960.000	0	-1.149.960.000	
	Optimalisasi/Peningkatan WTP Pulau Mecan	-					1.149.960.000	0	-1.149.960.000	
	Optimalisasi/Peningkatan WTP Pulau Kasu	-					702.630.000	0	-702.630.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
	Optimalisasi/Peningkatan WTP Pulau Jaloh	-					702.630.000	0	-702.630.000	
	Optimalisasi/Peningkatan WTP Belakang Padang	-					1.149.960.000	0	-1.149.960.000	
	Optimalisasi/Peningkatan SWRO Pulau Labu	Optimalisasi/Peningkatan SWRO Pulau Labu					2.103.494.400	2.103.494.400	0	
	Lanjutan Optimalisasi SWRO Belakang padang	Lanjutan Optimalisasi SWRO Belakang padang					17.014.968.000	17.014.968.000	17.014.968.000	
1.03.03.2.0 1.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan perpipaan yang dibangun	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan perpipaan yang dibangun	2.5 Liter/Detik	2.5 Liter/Detik	37.770.192.000	29.136.168.000	-8.634.024.000	
	Pembangunan SPAM Teluk Nipah Kel. Galang Baru	Pembangunan SPAM Teluk Nipah Kel. Galang Baru					15.911.628.000	15.911.628.000	0	
	Pembangunan SPAM Pulau Mubut Kel. Karas Kec. Galang	Pembangunan SPAM Pulau Mubut Kel. Karas Kec. Galang					13.224.540.000	13.224.540.000	0	
	Pembangunan SPAM Kel. Sijantung Kec. Galang	-					2.834.600.000	0	-2.834.600.000	
	Pembangunan SPAM Teluk Nipah Kel. Galang Baru Kec. Galang	-					2.723.600.000	0	-2.723.600.000	
	Lanjutan Pembangunan SWRO Belakang Padang	-					4.712.832.000	0	-4.712.832.000	
1.03.03.2.0 1.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	35 Unit	35 Unit	17.190.280.950	10.679.759.994	-6.510.520.956	
	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Belanja Bahan-Bahan Kimia					15.763.578.270	4.203.163.470	-11.560.414.800	
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					5.664.465.000	5.664.465.000	0	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					85.800.000	45.500.000	-40.300.000	
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis					717.600.000	715.000.000	-2.600.000	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					43.200.000	42.240.000	-960.000	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					1.793.880	1.596.012	-197.868	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					5.339.520	4.752.000	-587.520	
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh					0	2.640.000	2.640.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
		Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis								
		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis					0	101.112	101.112	
		Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis					0	302.400	302.400	
1.03.03.2.0 1.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah Yang terlayani oleh Perluasan sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah Yang terlayani oleh Perluasan sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	240 SR	273 SR	1.909.200.000	1.557.774.000	-351.426.000	
	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) SWRO Belakang Padang	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) SWRO Belakang Padang					477.300.000	519.258.000	41.958.000	
	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Teluk Nipah Kel. Galang Baru Kec. Galang	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Teluk Nipah Kel. Galang Baru Kec. Galang					477.300.000	519.258.000	41.958.000	
	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Batu Putih Pulau Karas Kec. Galang	-					477.300.000	0	-477.300.000	
	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Pulau Mubut Kel. Karas	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Pulau Mubut Kel. Karas					477.300.000	519.258.000	41.958.000	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang terlayani air limbah domestik	Persentase penduduk yang terlayani air limbah domestik	58.96 %	58.96 %	5.851.481.200	5.061.600.000	-789.881.200	
1.03.05.2.0 1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik/ MCK	Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik/ MCK	800 jiwa	484 jiwa	5.851.481.200	5.061.600.000	-789.881.200	
1.03.05.2.0 1.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) terpusat skala permukiman yang dibangun	Kapasitas sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) terpusat skala permukiman yang dibangun	1000 M3/Hari	4.24 M3/Hari	5.851.481.200	5.061.600.000	-789.881.200	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pulau Nguan Kelurahan Galang Baru	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pulau Nguan Kelurahan Galang Baru					506.160.000	506.160.000	0	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pulau Mecan Kel. Sekanak Raya Kec. Belakang Padang	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pulau Mecan Kel. Sekanak Raya Kec. Belakang Padang					506.160.000	506.160.000	0	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Teluk Bakau	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Teluk Bakau					506.160.000	506.160.000	0	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
	Kelurahan Pulau Terong Kec. Belakang Padang	Kelurahan Pulau Terong Kec. Belakang Padang								
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kel. Galang Baru Kec. Galang	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kel. Galang Baru Kec. Galang					506.160.000	506.160.000	0	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kel. Sekanak Raya Kec. Belakang Padang	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kel. Sekanak Raya Kec. Belakang Padang					506.160.000	506.160.000	0	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kel.Karas Kec. Galang	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kel.Karas Kec. Galang					506.160.000	506.160.000	0	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pulau Mubut Kel.Karas Kec. Galang	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pulau Mubut Kel.Karas Kec. Galang					506.160.000	506.160.000	0	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kel. Batu Legong Kec. Bulang	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kel. Batu Legong Kec. Bulang					506.160.000	506.160.000	0	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Teluk Nipah Kel. Galang Baru	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Teluk Nipah Kel. Galang Baru					506.160.000	506.160.000	0	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kel. Pulau Terong Kec. Belakang Padang	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kel. Pulau Terong Kec. Belakang Padang					506.160.000	506.160.000	0	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Bulang Lintang Kec. Bulang						789.881.200	0	-789.881.200	
1.03.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung sesuai standar	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung sesuai standar	33.33 %	33.33 %	71.474.085.670,16	91.267.566.288	19.793.480.617,84	
1.03.08.2.0 1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah unit bangunan daerah yang ditangani (dibangun, dipelihara, direhabilitasi/ revitalisasi dan diawasi)	Jumlah unit bangunan daerah yang ditangani (dibangun, dipelihara, direhabilitasi/ revitalisasi dan diawasi)	440 unit	440 unit	71.474.085.670,16	91.267.566.288	19.793.480.617,84	
1.03.08.2.0 1.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	15 Bangunan Gedung	14 Bangunan Gedung	39.167.564.111,16	52.152.878.473	12.985.314.361,84	
	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Belanja Jasa Tenaga Ahli					540.000.000	540.000.000	0	
		Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik						45.000.000	45.000.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
	Lanjutan Revitalisasi Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam	Rehabilitasi Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam					484.466.000	366.719.601	-117.746.399	
	Rehabilitasi Aula balai pertemuan Kantor Lurah Air Raja RT. 003 RW. 001 Kel. Air Raja	-					349.333.999,89	0	-349.333.999,89	
	Rehabilitasi Kantor Camat Lubuk Baja	Rehabilitasi Kantor Camat Lubuk Baja					427.630.500	3.737.760.000	3.310.129.500	
	Rehabilitasi Kantor Camat Sekupang	-					427.630.500	0	-427.630.500	
	Rehabilitasi Kantor Lurah Tiban Baru	-					427.630.500	0	-427.630.500	
	Revitalisasi Gedung Kantor Lurah Duriangkang Kec. Sei Beduk	Revitalisasi Gedung Kantor Lurah Duriangkang Kec. Sei Beduk					1.184.903.000	1.887.238.000	702.335.000	
	Revitalisasi Gedung Kantor Lurah Mangsang Kec. Sei Beduk	Revitalisasi Gedung Kantor Lurah Mangsang Kec. Sei Beduk					1.184.903.000	1.887.238.000	702.335.000	
	Revitalisasi Gedung Kantor Lurah Tanjung Piayu Kec. Sei Beduk	Revitalisasi Gedung Kantor Lurah Tanjung Piayu Kec. Sei Beduk					1.184.903.000	3.554.514.500	2.369.611.500	
	Revitalisasi Gedung Workshop TPA Telaga Punggur	-					625.900.000	0	-625.900.000	
	Revitalisasi Kantor Camat Batu Ampar	Revitalisasi Kantor Camat Batu Ampar					1.184.903.000	4.838.831.000	3.653.928.000	
	Revitalisasi Kantor Camat Belakang Padang	Revitalisasi Kantor Camat Belakang Padang					1.245.145.830	4.640.659.473	3.395.513.643	
	Revitalisasi Kantor Lurah Baloi Indah	-					1.184.903.000	0	-1.184.903.000	
	Revitalisasi Kantor Lurah Batu Merah	Revitalisasi Kantor Lurah Batu Merah					1.184.903.000	3.770.007.399	2.585.104.399	
	Revitalisasi Kantor Lurah Kampung Pelita	-					1.184.903.000	0	-1.184.903.000	
	Revitalisasi Kantor Lurah Lubuk Baja Kota	-					1.184.903.000	0	-1.184.903.000	
	Revitalisasi Kantor Lurah Patam Lestari Kec. Sekupang	Revitalisasi Kantor Lurah Patam Lestari Kec. Sekupang					1.184.903.000	3.554.514.500	2.369.611.500	
	Revitalisasi Kantor Lurah Sungai Harapan Kec. Sekupang	-					1.184.903.000	0	-1.184.903.000	
	Revitalisasi Kantor Lurah Sungai Jodoh	Revitalisasi Kantor Lurah Sungai Jodoh					1.184.903.000	3.552.158.500	2.367.255.500	
	Revitalisasi Kantor Lurah Tanjung Pinggir	-					1.184.903.000	0	-1.184.903.000	
	Lanjutan Revitalisasi Masjid Agung Batam Centre (Tahun Jamak)	Lanjutan Revitalisasi Masjid Agung Batam Centre (Tahun Jamak)					1.191.821.000	1.799.600.000	607.779.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
	Lanjutan Revitalisasi Masjid Baiturrahman Sekupang	Lanjutan Revitalisasi Masjid Baiturrahman Sekupang					625.900.000	5.033.940.000	4.408.040.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Agung Batam center	-					1.590.750.000	0	-1.590.750.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Sultan Mahmud Riayat					6.994.100.000	606.000.000	-6.388.100.000	
	Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah	Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah					2.146.623.000	2.146.623.000	0	
	Revitalisasi Gedung Beringin Kota Batam	-					550.750.000	0	-550.750.000	
	Manajemen Konstruksi (MK) Revitalisasi Gedung Beringin Kota Batam (Tahun Jamak)	Manajemen Konstruksi (MK) Revitalisasi Gedung Beringin Kota Batam (Tahun Jamak)						852.670.000	852.670.000	
	Konsultan Perencanaan Revitalisasi Gedung Beringin Kota Batam (UKL-UPL)	Konsultan Perencanaan Revitalisasi Gedung Beringin Kota Batam (UKL-UPL)						250.600.000	250.600.000	
	Konsultan Perencanaan Revitalisasi Gedung Beringin Kota Batam	Konsultan Perencanaan Revitalisasi Gedung Beringin Kota Batam						1.515.000.000	1.515.000.000	
	Revitalisasi Gedung P2TP2A	-					2.810.042.982,27	0	-2.810.042.982,27	
	Revitalisasi Lapangan Tenis Pemko Batam	-					625.900.000	0	-625.900.000	
	Revitalisasi/Rehabilitasi Rumah Dinas Jalan Kartini	-					496.464.800	0	-496.464.800	
	Revitalisasi/Rehabilitasi Rumah dinas Lurah Mangsang Kec. Sei Beduk	-					315.845.999	0	-315.845.999	
	Revitalisasi/Rehabilitasi Rumah Dinas Walikota Batam Tanjung Pinggir Kec. Sekupang	-					943.870.000	0	-943.870.000	
	Revitalisasi/Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Walikota Batam Tanjung Pinggir Kec. Sekupang	-					943.870.000	0	-943.870.000	
	Revitalisasi Kantor Lurah Batu Selicin	Revitalisasi Kantor Lurah Batu Selicin					3.649.976.500	3.649.976.500	0	
	-	Konsultan Perencanaan Revitalisasi/Rehabilitasi Kantor Lurah Muka Kuning Kec. Sei Beduk						97.818.000	97.818.000	
	-	Konsultan Perencanaan Revitalisasi/Rehabilitasi						97.818.000	97.818.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
		Kantor Lurah Kibing Kec. Batu Aji								
	-	Konsultan Perencanaan Revitalisasi/Rehabilitasi Kantor Lurah Buliang Kec. Batu Aji						97.818.000	97.818.000	
	-	Konsultan Perencanaan Revitalisasi/Rehabilitasi Kantor Kecamatan Sei Beduk						97.818.000	97.818.000	
	-	Konsultan Perencanaan Revitalisasi Kantor Lurah Taman Baloi Kec. Batam Kota						97.818.000	97.818.000	
	-	Konsultan Perencanaan Revitalisasi/Rehabilitasi Kantor Kecamatan Batam Kota						97.818.000	97.818.000	
	-	Konsultan Perencanaan Revitalisasi/Rehabilitasi Kantor Kecamatan Sagulung						97.818.000	97.818.000	
	-	Konsultan Perencanaan Revitalisasi Kantor Lurah Kabil Kec. Nongsa						97.818.000	97.818.000	
	-	Konsultan Perencanaan Revitalisasi Kantor Lurah Sambau Kec. Nongsa						97.818.000	97.818.000	
	-	Konsultan Perencanaan Revitalisasi/Rehabilitasi Kantor Lurah Kampung Pelita Kec. Lubuk Baja						97.818.000	97.818.000	
	-	Konsultan Perencanaan Revitalisasi Kantor Lurah Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja						97.818.000	97.818.000	
	-	Konsultan Perencanaan Revitalisasi/Rehabilitasi/Pembangunan Kantor Lurah Tg. Uma Kec. Lubuk Baja						0	0	
	-	Konsultan Perencanaan Revitalisasi Kantor Lurah Baloi Indah Kec. Lubuk Baja						97.818.000	97.818.000	
	-	Konsultan Perencanaan Revitalisasi/Kantor Lurah Sei Harapan Kec. Sekupang						97.818.000	97.818.000	
	-	Konsultan Perencanaan Revitalisasi/Kantor Lurah Tg. Pinggir Harapan Kec. Sekupang						97.818.000	97.818.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
	-	Konsultan Perencanaan Revitalisasi/Rehabilitasi Kantor Lurah Kampung Seraya Kec. Batu Ampar						97.818.000	97.818.000	
	-	Revitalisasi Aula Kantor Kantor Lurah Buliang Kec. Batu Aji						498.101.000	498.101.000	
	-	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Kantor Camat Bengkong						97.818.000	97.818.000	
	-	Lanjutan Revitalisasi Kantor Lurah Tiban Indah Kec. Sekupang						334.350.000	334.350.000	
	-	Lanjutan Revitalisasi Kantor Lurah Batu Besar Kec. Nongsa						498.101.000	498.101.000	
	-	Lanjutan Revitalisasi Kantor Lurah Belian Kec. Batam Kota						432.269.000	432.269.000	
	-	Lanjutan Revitalisasi Kantor Lurah Tanjung Buntung Kec. Bengkong						498.101.000	498.101.000	
1.03.08.2.0 1.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	3 Bangunan Gedung	4 Bangunan Gedung	10.089.662.680	10.094.462.680	4.800.000	
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					5.610.220.000	5.610.220.000	0	
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Penyedia jasa lainnya perorangan (Petugas pelayanan masjid)					798.075.200	798.075.200	0	
	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis					146.250.000	146.250.000	0	
	Belanja Tagihan Air	Belanja Tagihan Air					204.100.000	204.100.000	0	
	Belanja Tagihan Listrik	Belanja Tagihan Listrik					496.000.000	496.000.000	0	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN					48.000.000	44.880.000	-3.120.000	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Non ASN	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Non ASN					2.066.400	1.738.080	-328.320	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					6.142.080	5.157.120	-984.960	
	-	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis					0	7.920.000	7.920.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
	-	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis					0	328.320	328.320	
	-	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis					0	984.960	984.960	
	Pemeliharaan Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah	Pemeliharaan Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah					1.219.540.000	1.219.540.000	0	
	Pemeliharaan/Rehabilitai Masjid Engku Hamidah Batam Kota	Pemeliharaan/Rehabilitai Masjid Engku Hamidah Batam Kota					871.100.000	871.100.000	0	
	Pemeliharaan/Rehabilitai Masjid Baiturrahman Sekupang	Pemeliharaan/Rehabilitai Masjid Baiturrahman Sekupang					435.550.000	435.550.000	0	
	Pemeliharaan Bukit Clara Batam Centre	Pemeliharaan Bukit Clara Batam Centre					252.619.000	252.619.000	0	
1.03.08.2.0 1.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	15 Dokumen	6 Dokumen	21.807.178.879	28.642.225.135	6.835.046.256	
	Pembangunan Masjid dan Asrama Putra Pesantren Al-Fadhlu 7 Nongsa	Pembangunan Masjid Al-Fadhlu 7 Nongsa					2.719.928.000	0	-2.719.928.000	
	Pembangunan Masjid Al Islah	Pembangunan Masjid Al Islah					1.709.928.000	1.709.928.000	0	
	Pembangunan pagar Pura Agung Amerta Bhuana	Pembangunan pagar Pura Agung Amerta Bhuana					1.800.828.000	1.800.828.000	0	
	-	Pembangunan Gedung Barong Pura Agung Amerta Bhuana						972.478.00	972.478.00	
	Pembangunan Gedung Bersama 2	Pembangunan Gedung Bersama 2 (Tahun Jamak)					1.613.170.000	1.951.767.000	338.597.000	
	-	Konsultan Perencanaan Review Pembangunan Kantor Lurah Sukajadi Kec. Batam Kota						20.826.500	20.826.500	
	-	DED Pembangunan Gedung Kantor Disdukcapil Kota Batam						1.431.333.000	1.431.333.000	
	-	Lanjutan Pembangunan Kantor Lurah buliang Kec. Batu Aji						97.818.000	97.818.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
	-	Lanjutan Pembangunan Kantor Lurah Kibing Kec. Batu Aji						97.818.000	97.818.000	
	-	Lanjutan Pembangunan Kantor Lurah Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar						401.538.000	401.538.000	
	-	Lanjutan Pembangunan Kantor Lurah Sagulung Kota Kec. Sagulung						422.169.000	422.169.000	
	-	Lanjutan Pembangunan Kantor Lurah Tg. Uncang Kec. Batu Aji						493.051.000	493.051.000	
		Pembangunan Aula Kantor Lurah Kibing Kec. Batu Aji						493.051.000	493.051.000	
	Pembangunan kantor Lurah Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja	-					1.184.903.000	0	-1.184.903.000	
	Pembangunan Kantor Lurah Batu Selicin	-					1.184.903.000	0	-1.184.903.000	
	Pembangunan Kantor Camat Nongsa	Pembangunan Kantor Camat Nongsa					1.184.903.000	5.720.368.500	4.535.465.500	
	Pembangunan Gedung Pengawas dan Penilik Dinas Pendidikan	-					2.447.458.000	0	-2.447.458.000	
		Pembangunan Kantor Lurah Tanjung Sengkuang (tunda bayar)						370.379.395	370.379.395	
		Konsultan Pengawasan Pembangunan Kantor Lurah Tanjung Sengkuang (tunda bayar)						18.701.900	18.701.900	
	Pembangunan Gedung Workshop Kerajinan Batik Batam	Pembangunan Gedung Workshop Kerajinan Batik Batam					493.051.000	972.154.000	479.103.000	
	Pembangunan Pagar gedung Serba Guna Kampung Bugis Batu RT. 002 RW. 001 Sel. Sekanak Raya Kec. Belakang Padang	Pembangunan Pagar gedung Serba Guna Kampung Bugis Batu RT. 002 RW. 001 Sel. Sekanak Raya Kec. Belakang Padang					352.895.640	368.211.420	15.315.780	
	Pembangunan Pagar gedung Serba Guna RW. 02 Kampung Jawa Kel. Sekanak Raya Kec. Belakang Padang	Pembangunan Pagar gedung Serba Guna RW. 02 Kampung Jawa Kel. Sekanak Raya Kec. Belakang Padang					352.895.640	368.211.420	15.315.780	
	Pembangunan Kantor Lurah Tiban Lama	-					1.184.903.000	0	-1.184.903.000	
	Lanjutan Pembangunan Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah Kota Batam						357.862.800	0	-357.862.800	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
	Pembangunan Gedung Terpadu RSUD (Gedung Pelayanan Terpadu KJSU)						1.748.934.000	0	-1.748.934.000	
	Pembangunan Landscape Sultan Mahmud Riayat Syah Kota Batam						611.751.200	0	-611.751.200	
	Lanjutan Pembangunan Pagar Masjid Agung Batam Centre						1.377.254.000	0	-1.377.254.000	
	Pembangunan Pagar Kantor DPRD Kota Batam						171.733.599	0	-171.733.599	
	Pembangunan Pagar Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah Kota Batam						1.802.928.000	3.116.568.000	1.313.640.000	
1.03.08.2.0 1.1023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	407 Dokumen	416 Dokumen	409.680.000	378.000.000	-31.680.000	
	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Belanja Jasa Tenaga Ahli					378.000.000	378.000.000	0	
	Belanja Makan dan Minum Rapat	-					31.680.000	0	-31.680.000	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase peningkatan tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi	Persentase peningkatan tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi	33.33%	33.33%	565.227.200	490.678.000	-74.549.200	
			Persentase penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	27.27%	27.27%				
1.03.11.2.0 1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang disertifikasi dan Lembaga jasa konstruksi yang dibina	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang disertifikasi dan Lembaga jasa konstruksi yang dibina	400 orang	400 orang	543.598.400	481.524.400	-62.074.000	
1.03.11.2.0 1.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi	300 Orang	300 Orang	404.385.200	370.482.200	-33.903.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
	Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi						
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					26.287.200	26.287.200	0	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					23.100.000	22.425.000	-675.000	
	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					86.100.000	86.100.000	0	
	Belanja Pakaian Siaga	Belanja Pakaian Siaga					50.670.000	50.670.000	0	
	Belanja Registrasi/Keanggotaan	Belanja Registrasi/Keanggotaan					185.000.000	185.000.000	0	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-					33.228.000	0	-33.228.000	
1.03.11.2.0 1.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	19 Lembaga	19 Lembaga	139.213.200	111.042.200	-28.171.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					48.733.200	28.213.200	-20.520.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					16.500.000	8.625.000	-7.875.000	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					46.000.000	46.000.000	0	
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					27.980.000	28.204.000	224.000	
1.03.11.2.0 4	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Jumlah pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100 Laporan	100 Laporan	21.628.800	9.153.600	-12.475.200	
1.03.11.2.0 4.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah paket pekerjaan jasa konstruksi kabupaten/kota yang diawasi dan dievaluasi tertib penyelenggaraan	Jumlah paket pekerjaan jasa konstruksi kabupaten/kota yang diawasi dan dievaluasi tertib penyelenggaraan	80 Paket Pekerjaan	100 Paket Pekerjaan	10.377.600	9.153.600	-1.224.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						873.600	0	-873.600	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					9.504.000	2.817.600	-6.686.400	
		Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)						4.815.900	4.815.900	
		Belanja Pakaian Siaga						1.520.100	1.520.100	
1.03.11.2.0 4.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Bnagunan Konstruksi kabupaten/kota	Jumlah Bnagunan Konstruksi kabupaten/kota	10 Bangunan	10 Bangunan	5.625.600	0	-5.625.600	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
	Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	yang diawasi dan dievaluasi tertib pemanfaatan produk	yang diawasi dan dievaluasi tertib pemanfaatan produk	Konstruksi	Konstruksi				
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						873.600	0	-873.600	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						4.752.000	0	-4.752.000	
1.03.11.2.0 4.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi kabupaten/kota yang diawasi dan dievaluasi tertib usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi kabupaten/kota yang diawasi dan dievaluasi tertib usaha	10 Badan Usaha	10 Bangunan Konstruksi	5.625.600	0	-5.625.600	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						873.600	0	-873.600	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						4.752.000	0	-4.752.000	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian Pembangunan terhadap rencana tata ruang	Persentase kesesuaian Pembangunan terhadap rencana tata ruang	30.93 %	32.05 %	4.360.748.810	2.133.437.000	-2.227.311.810	
1.03.12.2.0 1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kota Batam yang Ditetapkan	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kota Batam yang Ditetapkan	403 dokumen	551 dokumen	3.271.408.810	1.022.337.000	-2.249.071.810	
1.03.12.2.0 1.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	401 dokumen	550 dokumen	1.042.902.100	967.167.000	-75.735.100	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					6.168.000	6.168.000	0	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					42.900.000	44.850.000	1.950.000	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					708.600.000	817.800.000	109.200.000	
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang					285.234.100	98.349.000	-186.885.100	
1.03.12.2.0 1.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	2 dokumen	1 dokumen	2.228.506.710	55.170.000	-2.173.336.710	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					35.088.000	20.670.000	-14.418.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					50.820.000	34.500.000	-16.320.000	
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-						2.142.598.710	0	-2.142.598.710	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
	Pengembangan Pemanfaatan Ruang									
1.03.12.2.0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi publik	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi publik	50 orang	50 orang	19.800.000	0	-19.800.000	
1.03.12.2.0 2.0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah kegiatan peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat	Jumlah kegiatan peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat	1 kegiatan	1 kegiatan	19.800.000	0	-19.800.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-					19.800.000	0	-19.800.000	
1.03.12.2.0 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan dokumen hasil monev wilayah perencanaan	Jumlah ketersediaan dokumen hasil monev wilayah perencanaan	2 dokumen	2 dokumen	927.552.000	1.000.432.000	72.880.000	
1.03.12.2.0 3.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	5 dokumen	1 dokumen	805.376.000	763.260.000	-42.116.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					10.420.000	5.210.000	-5.210.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					10.956.000	8.970.000	-1.986.000	
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang					784.000.000	749.080.000	-34.920.000	
1.03.12.2.0 3.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	122.176.000	237.172.000	114.996.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					10.420.000	4.168.000	-6.252.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					10.956.000	8.280.000	-2.676.000	
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang					100.800.000	224.724.000	123.924.000	
1.03.12.2.0 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	8 Dokumen	5 Dokumen	141.988.000	110.668.000	-31.320.000	
1.03.12.2.0 4.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor								
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Belanja Jasa Tenaga Administrasi								
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang								
1.03.12.2.0 4.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	5 Dokumen	5 Dokumen	122.188.000	110.668.000	-11.520.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					14.588.000	5.210.000	-9.378.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					7.920.000	6.900.000	-1.020.000	
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang					99.680.000	98.558.000	-1.122.000	
1.03.12.2.0 4.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	1 Berita Acara	1 Berita Acara	19.800.000	0	-19.800.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						19.800.000	0	-19.800.000	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025 – 2029 dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2026.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II.

4.1. Catatan Penting

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan terkait urusan pekerjaan umum Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan. Guna untuk mendukung program prioritas pimpinan di bidang penyediaan air bersih, diharapkan untuk dapat lebih memprioritaskan anggaran kedepannya. Selain untuk mendukung program prioritas pimpinan juga mendukung Standar Pelayanan Minimal yang diwajibkan oleh Pemerintah Pusat yakni :

- a. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Selain itu di Tahun 2026 ini keluar aturan dari pusat yakni Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2026 maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun Anggaran 2026;
2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2026 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2026.

WALIKOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD